

Fenomena “Quick Count” Mewarnai Pemilu 2004

Oleh:

Ir. Budi Setiawan, MMT.

Abstract

The role of applied statistics in the process of General Election (Pemilu) 2004 has been a social phenomenon. The pros and contras to the result of vote counting using the “Quick Count” method are the evident that some people are still in doubt of the accuracy of the sampling process. In fact, the proper application of sampling method and the empirical facts can assure the accuracy of conclusion and decision making. The benefits of the method are the faster process of the information resulted, and the less opportunity of result modification and manipulation. More important, the government efforts to establish “Good Governance”) can be realized as demanded by the society.

Pendahuluan

Dalam hitungan 1 x 24 jam gambaran hasil perolehan suara pemilu presiden (pilpres) putaran I sudah dapat dilihat secara jelas, berapa besar prosentase raihan suara dari mulai urutan pertama sampai urutan terakhir. Berbagai media memberikan apresiasi positif sekaligus memuji keberhasilan pelaksanaan pilpres kali ini, para pelaku pasar, kalangan diplomatik, dan masyarakat internasional memberikan pujian yang tulus terhadap keberhasilan bangsa Indonesia dalam melaksanakan proses demokrasi ini. Indikator yang sangat jelas terlihat dari penguatan nilai tukar rupiah dan transaksi saham yang terus bergairah mewarnai hingar bingarnya hasil pelaksanaan pilpres saat ini.

Kondisi ini terjadi karena pelaksanaan pemilu berjalan lancar tanpa adanya gejolak yang signifikan menghambat perjalanan proses demokrasi yang mulai dibangun sejak bergulirnya era reformasi pada tahun 1998. Lebih dari itu, sehari sesudahnya tak berkembang spekulasi negatif mengenai hasil pemilu, sekalipun muncul komentar kontroversial dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengesahkan surat suara yang salah dalam pencoblosan, serta munculnya kembali kesangsian terhadap perhitungan Teknologi Informasi (TI) dari KPU.

Seperti kita ketahui bersama, setelah sebagian besar masyarakat melaksanakan proses pencoblosan pada tanggal 5 Juli 2004 walau diwarnai dengan keluarnya surat edaran dari KPU tentang pengesahan terhadap surat suara yang dicoblos tanpa membuka lebar-lebar kartu suaranya, maka pada malam harinya Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) bekerjasama dengan NDI (National Democratic Institute) memutuskan untuk mengumumkan hasil perhitungan cepat (*quick count*). Pengumuman ini dilakukan sesegera mungkin dengan harapan tidak akan terjadi gejolak dan spekulasi terhadap hasil pilpres I ini. Berdasarkan data yang diambil dari 2.500 TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang merupakan sampel dari sekitar 550.000 TPS yang ada diseluruh wilayah negara yang dalam istilah statistika sering disebut populasi (*unit of observation*), dan hasilnya diproses dengan menggunakan komputer. Dari informasi yang muncul diperoleh gambaran pasangan SBY-Kalla menduduki posisi pertama dengan perolehan suara dalam kisaran 33%, kemudian diikuti oleh Mega-Hasyim 26%, Wiranto-Salahuddin 23%, Amien-Siswono 14%, terakhir Hamzah-Agum sekitar 3%. Dengan menggunakan simpangan baku (*margin of error*) plus-minus 1,1% hasil penghitungan tersebut sudah cukup aman untuk diumumkan. Dan belakangan terbukti, bahwa kalau kita bandingkan dengan hasil tabulasi yang dimunculkan dari perhitungan TI (Teknologi Informasi) KPU yang saat itu sudah mencapai sekitar 93 juta pemilih

(Kompas, 13 Juli 2004) prosentase raihan suara tidak pernah beranjak dari angka prediksi yang telah dikeluarkan oleh kedua lembaga tersebut. Dengan menggunakan teknik sampling yang tepat, artinya metode/cara pengambilan sampel yang benar-benar memperhatikan karakteristik dari objek yang akan diperiksa/diukur, dan di dukung oleh penetapan *bound of error* (batas kekeliruan) yang tepat tentunya hasil prediksi dari hasil penghitungan *quick count* ini akan mempunyai tingkat akurasi yang cukup tinggi.

Dengan demikian hasil perhitungan cepat tersebut sudah cukup menjadikan pegangan (acuan) bagi masyarakat dan para pelaku bisnis lainnya dalam melakukan strategi ke depan. Dari perhitungan cepat ini yang terpenting adalah memberikan gambaran mengenai persentase awal mengenai kemungkinan perolehan suara masing-masing kandidat. Gambaran hasil raihan suara pemilu ini sangat berguna bagi masyarakat pada umumnya, dan khususnya bagi elite politik, maupun pelaku bisnis dan masyarakat internasional.

Apa dan Bagaimana “Quick Count”?

Istilah kata “*Quik Count*” (perhitungan cepat) menjadi fenomena masyarakat Indonesia saat ini, beberapa ada yang pro dan kontra terhadap informasi ini yang pada gilirannya memunculkan kesimpangsiuran dalam proses perhitungan suara pilpres I. Oleh karena itu ada baiknya kalau masalah tersebut perlu dijelaskan seperlunya supaya tidak terjadi salah pengertian. Perhitungan cepat (*quick count*) atau biasa juga disebut PVT (*parallel vote tabulation*) merupakan metode menghitung hasil pemilu dengan memanfaatkan data dari sampel. Artinya perhitungan dilakukan terhadap hasil pemungutan suara dari sejumlah TPS terpilih yang telah direkam oleh beberapa orang relawan yang diterjunkan khusus untuk itu. Penentuan TPS mana yang akan dijadikan objek pengamatan ditentukan berdasarkan proses pemilihan secara acak dan proporsional sesuai dengan banyaknya jumlah penduduk pada masing-masing wilayah. Dengan demikian, sebenarnya bagi masyarakat yang pernah mengenal atau mempelajari Metode Statistika pasti akan memahami proses sampling (teknik/metode pengambilan sebagian objek yang akan diteliti dari sejumlah populasi) yang hasilnya berupa ukuran sampel.

PVT atau *quick count* ini sama dengan *survey public opinion polling* atau bentuk *survey-survey* lainnya yang merupakan bagian dari kegiatan penelitian (riset) dengan memperhatikan standar-standar operasional, standar etika penelitian, dan etika keilmuan. Sekarang ini *quick count* sepenuhnya telah menggunakan prinsip-prinsip statistika terapan. Oleh karena itulah metode ini akan mengandalkan teknik sampling yang selalu mencantumkan *margin of error* tetentu, pada *level of significans* (tingkat kepercayaan) tertentu, misalnya orang bisa menggunakan angka 99%, 95% atau 90%. Keadaan ini sangat tergantung pada jenis dan karakteristik penelitian yang akan dilakukan, ini dipakai untuk dapat menggambarkan kenyataan yang sebenarnya. Oleh karenanya *quick count* atau PVT harus dibaca sesuai kaidah asas peluang (*probability*). Artinya gambaran yang sebenarnya atau persentase hasil perhitungan *quick count* ini bila dibandingkan dengan dengan hasil perhitungan akhir KPU, harus berada pada batas-batas *margin of error* (MoE) atau istilah lainnya simpangan baku (penyimpangan) yang sudah ditetapkan. Atau dengan perkataan lain hasil perhitungan suara yang diperoleh dari KPU harus berada pada rentang batas bawah dan batas atas sesuai dengan MoE yang telah ditetapkan.

Ambil contoh, misalnya *quick count* mendapatkan hasil perhitungan suara untuk SBY-Kalla sebesar 33%, dengan MoE yang ditetapkan sebesar 1,1% maka prediksi hasil perhitungan suara nantinya harus berada pada rentang batas bawah 32,9% dan batas

atas 34,1% dan demikian seterusnya untuk hasil-hasil perolehan suara dari kandidat presiden yang lainnya. Dari hasil prediksi tersebut, bisa dilihat tingkat akurasi setelah keseluruhan proses perhitungan suara selesai dilakukan oleh KPU untuk seluruh TPS yang ada. Dengan demikian jika hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh KPU secara nasional berada pada batas-batas rentang tersebut, maka hasil perhitungan *quick count*, secara Statistika dapat dikatakan akurat.

Data hasil dari TPS yang berasal dari sampel, akan direkam dan dikirimkan oleh para relawan atau tenaga pengumpul data sesuai dengan jumlah TPS sampel secara nasional. Seandainya ditetapkan 2.500 TPS, maka LP3ES akan menerjunkan sebanyak 5.000 orang relawan untuk memantau proses berlangsungnya perhitungan suara di masing-masing TPS terpilih tersebut. Hasil dari pemantauan para relawan tersebut segera dikirimkan ke bagian pengolahan data statistik di LP3ES dan pada saat itu pula dapat dengan cepat LP3ES dan NDI dapat memberikan informasi gambaran capaian perolehan suara untuk masing-masing kandidat Presiden dan Wakil Presiden. Perlu diketahui pula bahwa tugas relawan pada saat pelaksanaan pencoblosan adalah memantau/mencatat hasil penghitungan di TPS sampel, melakukan pemantauan mengenai proses pelaksanaan pencoblosan dan melakukan wawancara terhadap empat orang pemilih (ditentukan pula secara acak) yang sudah menggunakan hak pilihnya. Ketiganya dilakukan dengan menggunakan formulir isian/kuesioner. Oleh sebab itu dalam *quick count* ini dilakukan pula beberapa kegiatan sekaligus, yaitu penghitungan suara cepat itu sendiri, pemantau dan *exit poll*. *Exit Poll* adalah survai terhadap pemilih yang sudah menggunakan hak suaranya dan berlangsung di luar TPS dengan cara wawancara tatap muka dengan sejumlah responden.

Secara umum *quick count* ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengontrol dan mendorong dihasilkannya pemilu yang jujur dan adil (jurdil). Hasil penghitungan *quick count* menjadi dasar pijakan sementara atau acuan masyarakat luas untuk mengontrol hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh KPU. Untuk itu pula *quick count* dapat dipergunakan untuk memprediksi hasil pemilu secara cepat. Prediksi ini diperlukan karena masyarakat setelah melaksanakan hak pilihnya, akan dengan sendirinya ingin memperoleh gambaran secara cepat terhadap hasil secara keseluruhan dan tentunya kondisi ini dapat dipenuhi melalui metode *quick count*. Karena semakin lama masyarakat menunggu hasil pemungutan suara, akan semakin banyak spekulasi ataupun sinyalemen negatif yang tentunya akan mengganggu sehingga pada gilirannya akan membawa dampak pada jalannya proses demokrasi yang saat ini banyak dinilai masyarakat internasional sudah berjalan dengan baik. Hasil *quick count* dapat pula mencegah, kepanikan di kalangan pelaku pasar akibat dari berkembangnya rumor mengenai proses perhitungan hasil pilpres I ini. Selain itu, *quick count* dapat digunakan pula untuk mencegah terjadinya kecurangan-kecurangan pada perhitungan suara yang direkam secara bersama-sama dalam perhitungan suara yang dilakukan di TPS. Ini merupakan hasil pemantauan yang dilakukan dalam bentuk satu paket dengan *quick count*. Pemantauan semacam ini perlu sekali dilakukan karena pelaksanaan pemilu, khususnya di negara-negara yang baru mengalami transisi ke demokrasi, pada umumnya rentan dengan manipulasi, lebih-lebih pada pemilu di negara-negara yang sistem politiknya belum sepenuhnya demokratis.

Quick Count dapat pula digunakan untuk mengidentifikasi kecenderungan perilaku/sikap politik pemilih, membangun kepercayaan masyarakat terhadap kualitas hasil pemilu sekaligus mendorong partisipasi masyarakat. Perhitungan cepat inipun

dilakukan sebagai bagian dari upaya mengontrol proses pelaksanaan pemilu agar dihasilkan pemilu yang betul-betul jujur dan adil sesuai kaidah-kaidah pemilu sebagaimana ditentukan masyarakat internasional melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Oleh sebab itu, tidak pada tempatnya jika KPU merasa terganggu oleh hasil *quick count* ini. KPU akan lebih bijak untuk jalan terus melakukan proses penghitungan suara untuk mendapatkan komposisi capres secara keseluruhan (nasional). Karena hasil perhitungan KPU-lah yang secara legitimasi (mempunyai dasar hukum yang kuat) yang nantinya menjadi hasil akhir pemilihan umum secara nasional, termasuk hasil pemilihan presiden putaran I ini.

Metode perhitungan cepat khususnya di negara transisi demokrasi ini, pertamanya memang muncul di Filipina. Apa yang dilakukan NAMFREL pada saat itu Pemilu tahun 1986 di Filipina merupakan bagian awal dari sejarah dilakukannya *quick count*. Melalui perhitungan yang dilakukannya NAMFREL menemukan berbagai bukti-bukti kecurangan dan manipulasi suara. Secara meyakinkan NAMFREL dapat menunjukkan kemenangan berpihak pada Corry Aquino, sekaligus menggagalkan klaim kemenangan Marcos. Kebijakan Marcos menganulir kemenangan Corry Aquino, serta- merta memicu amuk massa yang kemudian muncul pembangkangan masyarakat sipil dan perlawanan rakyat dalam bentuk *people power* yang kemudian berhasil menggulingkan rezim otoriter Marcos.

Setelah itu, metode ini digunakan pula di beberapa negara yang sedang mengalami transisi ke demokrasi, termasuk di sejumlah negara di kawasan Eropa Timur dan beberapa negara Amerika Latin. Dengan demikian penerapan dan pengembangan metode *quick count* merupakan bagian dari upaya untuk menegakkan demokrasi dengan cara mendorong berlangsungnya proses demokrasi (khususnya pemilu) yang jujur dan adil.

Di negara kita sendiri penerapan *quick count* bukan yang pertama kali, tapi sudah dimulai pada pemilu tahun 1997, terakhir rezim Soeharto berkuasa. Waktu itu beberapa lembaga swadaya masyarakat melakukannya, dan yang lebih fokus adalah LP3ES melaksanakan perhitungan cepat di wilayah Jakarta. Dengan cara diam-diam bekerjasama dengan salah satu kekuatan politik, eksperimen ini berhasil. Satu hari setelah pelaksanaan pemilu di DKI, LP3ES berhasil memprediksi secara akurat perolehan suara di wilayah tersebut dan hasilnya tidak jauh meleset dari hasil perhitungan yang dilakukan oleh Lembaga Pemilihan Umum (waktu itu LPU). Tetapi pertimbangan keamanan dan politik saat itu hasil *quick count* tersebut tidak diumumkan kepada masyarakat.

Pada pemilu 1999, LP3ES melakukan pula perhitungan cepat di seluruh wilayah Jawa dan NTB. Waktu itu hasilnya dapat memprediksi urutan perolehan suara untuk masing-masing partai berikut presentsenya. Pengalaman ini semua telah menjadi pijakan dasar pelaksanaan *quick count* untuk pemilu 2004, baik untuk pemilihan anggota legislatif yang telah dilakukan pada bulan April 2004 dan piplres putaran I bulan Juli 2004 ini. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk pilpres putaran II yang akan dilaksanakan pada bulan September 2004 untuk memilih orang nomor satu yang akan memimpin negara tercinta ini akan dilakukan dengan menggunakan pola yang hampir sama dengan model-model sebelumnya. Dengan demikian hasil perolehan suara yang dihasilkan, tentunya akan dapat dengan cepat diserap/dibaca oleh masyarakat luas dan kita semua tidak semestinya harus terus menunggu berlama-lama dalam memperoleh informasi hasil perolehan suara yang akan dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berlaku secara nasional.

Berdasarkan ini semua, janganlah kita menjadi risau dengan munculnya beberapa lembaga swadaya masyarakat yang terus memantau jalannya proses pemungutan suara, karena pada akhirnya kita telah memahami bahwa informasi yang cepat dengan serta merta akan membuat kita dapat melakukan antisipasi terhadap berbagai perubahan dengan cepat pula.

Penutup

Demikianlah sekelumit fenomena *quick count* yang semestinya tidak perlu untuk dipermasalahkan, karena saya yakin beberapa mahasiswa, peneliti dan ilmuwan sudah pernah walaupun hanya sedikit mempelajari bidang Ilmu Statistika Terapan yang di dalamnya telah mempelajari bagaimana kita melakukan proses pengambilan kesimpulan ataupun keputusan yang didasarkan pada data sampel.